



Manual Indikator Kinerja 2025

Balai Besar Karantina
Hewan Ikan dan Tumbuhan
DKI Jakarta Lingkup
Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia

KATA PENGANTAR

kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta TA.2025. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU. Manual IKU berisi informasi karakteristik IKU, definisi, dan cara pengukuran.

Manual IKU ini diharapkan dapat menjadi acuan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Manual IKU Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta.

Jakarta, 04 Juli 2025

Balai Besar Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta



drh. Amir Hasanuddin, M.M
NIP. 197201102000031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. SS.1 Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional	4
1. IKK.1 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	4
2. IKK.2 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditindaklanjuti	5
3. IKK.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)	5
4. IKK.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)	6
B. SS.2 Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang partisipatif.....	7
1. IKK.5 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain).....	7
2. IKK.6 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	7
3. IKK.7 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3).....	8
C. SS.3 Terwujudnya layanan Humas yang baik.....	9
1. IKK.8 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat	9
2. IKK.9 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	9
D. SS.4 Terwujudnya layanan Keuangan yang baik.....	10
1. IKK.10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan BBKHIT DKI Jakarta.....	10
E. SS.5 Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	11
1. IKK.11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	11

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian										
SS.1	Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional										
IK.1.1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam Wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti										
	Validitas : Output Kendali Tinggi										
	Polarisasi : Maximize										
	Definisi : Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK termasuk media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan atau pakan ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pada pangan dan pakan pada kegiatan pemantauan, maka keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK serta keberadaan cemaran pangan dan pakan di wilayah Indonesia dapat dideteksi secara dini, sehingga dapat dilakukan Tindakan cepat sedini mungkin untuk mencegah penyebarannya di wilayah Indonesia. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Karantina Indonesia, dalam menilai sejauh mana HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan dan pakan dapat dicegah masuk dan penyebarannya di dalam wilayah Indonesia, atau lolos dari pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran. Selain itu juga digunakan sebagai bahan informasi dan justifikasi ilmiah dalam penentuan daerah sebar yang sebenarnya dari HPHK, HPIK dan OPTK di wilayah Indonesia.										
	Indikator Atasan: Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti										
	Metode Pengukuran : Menghitung Jumlah jenis temuan HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan atau pakan hasil pemantauan atau monitoring										
	Sumber Data : Badan Karantina Indonesia (Rekapitulasi temuan jenis HPHK, HPIK, OPTK serta cemaran pangan atau pakan hasil pemantauan dari Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Deputi Karantina Hewan/ Ikan/ Tumbuhan)										
	Status : Digunakan										
	Periode Pelaporan : Mingguan										
	Metode Cascading : Komponen Pembentuk										
	Target :										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahunan</th> <th>TW I</th> <th>TW II</th> <th>TW III</th> <th>TW IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 Jenis</td> <td>0 Jenis</td> <td>1 Jenis</td> <td>1 Jenis</td> <td>2 Jenis</td> </tr> </tbody> </table>	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	4 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV							
4 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis							
	Perhitungan Data : Akumulasi										

IK.1.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan Pengeluaran yang di tindak lanjuti										
	Validitas : Output Kendali Tinggi										
	Polarisasi : Maximize										
	Definisi : Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia melalui Tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan atau pengeluaran, maka HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud dapat terdeteksi, sehingga dapat dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya yang bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud di dalam wilayah Indonesia.										
	Indikator Atasan: Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditindaklanjuti										
	Metode Pengukuran : Menghitung Jumlah jenis temuan HPHK, HPIK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan di tempat pemasukan atau pengeluaran (impor, antar area dan ekspor). Temuan HPHK, HPIK dan OPTK berasal dari kegiatan pemeriksaan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan baik masuk atau keluar (impor, antar area maupun ekspor).										
	Sumber Data : Badan Karantina Indonesia (Rekapitulasi data temuan jenis HPHK, HPIK dan OPTK yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia										
	Status : Digunakan										
	Periode Pelaporan : Mingguan										
	Metode Cascading : Komponen Pembentuk										
	Target : <table border="1" data-bbox="456 1430 1369 1493"> <thead> <tr> <th>Tahunan</th> <th>TW I</th> <th>TW II</th> <th>TW III</th> <th>TW IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 Jenis</td> <td>1 Jenis</td> <td>1 Jenis</td> <td>1 Jenis</td> <td>1 Jenis</td> </tr> </tbody> </table>	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	4 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV							
4 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis							
	Perhitungan Data : Akumulasi										
IK.1.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)										
	Validitas : Output Kendali Tinggi										
	Polarisasi : Maximize										
	Definisi :										

<p>Indikator ini menggambarkan keberhasilan UPT dalam melaksanakan kegiatan perkarantinaan untuk memastikan bahwa komoditas yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (impor) maupun yang dialulintaskan antar area didalam wilayah RI sudah sesuai dengan persyaratan karantina yang direpresentasikan atau dibuktikan dengan sertifikat pelepasan/ pembebasan karantina impor dan antar area.</p>															
<p>Indikator Atasan: Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)</p>															
<p>Metode Pengukuran : Menghitung jumlah sertifikat pelepasan/ pembebasan karantina impor dan antar area</p>															
<p>Sumber Data : Data operasional perkarantinaan di UPT</p>															
<p>Status : Digunakan</p>															
<p>Periode Pelaporan : Mingguan</p>															
<p>Metode Cascading : Komponen Pembentuk</p>															
<p>Target Tahun 2024 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahunan</th> <th>TW I</th> <th>TW II</th> <th>TW III</th> <th>TW IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79.759 Sertifikat</td> <td>19.939 Sertifikat</td> <td>19.939 Sertifikat</td> <td>19.939 Sertifikat</td> <td>19.942 Sertifikat</td> </tr> </tbody> </table>						Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	79.759 Sertifikat	19.939 Sertifikat	19.939 Sertifikat	19.939 Sertifikat	19.942 Sertifikat
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV											
79.759 Sertifikat	19.939 Sertifikat	19.939 Sertifikat	19.939 Sertifikat	19.942 Sertifikat											
IK.1.4	<p>Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)</p>														
<p>Validitas : Output Kendali Tinggi</p>															
<p>Polarisasi : Maximize</p>															
<p>Definisi : Indikator ini menggambarkan keberhasilan UPT dalam memberikan dukungan ekspor media pembawa dengan memastikan bahwa komoditas yang dikeluarkan dari Indonesia (ekspor) sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan agar dapat diterima di negara tujuan melalui kegiatan sertifikasi karantina ekspor sudah sesuai persyaratan negara tujuan.</p>															
<p>Indikator Atasan: Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)</p>															
<p>Metode Pengukuran : Menghitung jumlah sertifikat pelepasan/ pembebasan karantina Ekspor.</p>															
<p>Sumber Data : Data operasional perkarantinaan UPT</p>															
<p>Status : Digunakan</p>															
<p>Periode Pelaporan : Mingguan</p>															
<p>Metode Cascading : Komponen Pembentuk</p>															

Target :					
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
	30.002 Sertifikat	7.500 Sertifikat	7.500 Sertifikat	7.500 Sertifikat	7.502 Sertifikat
Perhitungan Data : Akumulasi					
SS.2 Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang partisipatif					
IK.2.5	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan Karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)				
	Validitas : Output Kendali Tinggi				
	Polarisasi : Maximize				
	Definisi : Indikator ini menggambarkan keberhasilan UPT dalam melibatkan Masyarakat untuk turut melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina.				
	Indikator Atasan: Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)				
	Metode Pengukuran : Jumlah pihak ketiga yang diregistrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di UPT				
	Sumber Data : Data pihak ketiga yang diregistrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di UPT				
	Status : Digunakan				
	Periode Pelaporan : Mingguan				
	Metode Cascading : Komponen Pembentuk				
Target :					
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
	33 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen
Perhitungan Data : Akumulasi					
IK.2.6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindak Karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindak karantina (permohonan registrasi pihak lain)				
	Validitas : Output Kendali Tinggi				
	Polarisasi : Maximize				
	Definisi : Indikator ini menggambarkan keberhasilan UPT dalam mendorong keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina dengan memberikan				

	kesempatan kepada Masyarakat untuk mengajukan diri sebagai pelaksana Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina.										
	Indikator Atasan: Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)										
	Metode Pengukuran : Data pihak ketiga yang mengajukan diri dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di UPT										
	Sumber Data : Data pihak ketiga yang diregistrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di UPT										
	Status : Digunakan										
	Periode Pelaporan : Bulanan										
	Metode Cascading : Komponen Pembentuk										
	Target :										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahunan</th> <th>TW I</th> <th>TW II</th> <th>TW III</th> <th>TW IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39 Dokumen</td> <td>9 Dokumen</td> <td>10 Dokumen</td> <td>10 Dokumen</td> <td>10 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	39 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV							
39 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen							
	Perhitungan Data : Akumulasi										
IK.2.7	Jumlah Kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)										
	Validitas : Output Kendali Tinggi										
	Polarisasi : Maximize										
	Definisi : Indikator ini menggambarkan keberhasilan UPT dalam penegakan hukum perkarantinaan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dalam bentuk sanksi hukum pidana. Batasan yang dihitung dari indicator ini adalah kasus pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan melalui tindakan karantina 8P sehingga masuk projustisi, terjadi di tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan dan ditangani oleh PPNS Karantina, serta penyelesaian kasus yang sampai P21 atau SP3 terhadap kasus yang ada atau kasus yang sedang ditangani										
	Indikator Atasan: Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3)										
	Metode Pengukuran : Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 atau SP3 terhadap kasus yang sedang ditangani										
	Sumber Data : Data penegakan hukum perkarantinaan UPT										
	Status : Digunakan										
	Periode Pelaporan : Tahunan										

Metode Cascading : Komponen Pembentuk				
Target :				
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen
Perhitungan Data : Akumulasi				
SS.3 Terwujudnya layanan Humas yang baik				
IK.3.8 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat				
Validitas : Output Kendali Tinggi				
Polarisasi : Maximize				
Definisi : Indikator ini mencerminkan kinerja Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia dalam upaya membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terhadap arti penting perkarantinaan di Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mempublikasikan informasi perkarantinaan kepada Masyarakat pada berbagai kelompok usia dan berbagai kalangan Masyarakat.				
Indikator Atasan: Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat				
Metode Pengukuran : Jumlah publikasi yang di publish oleh Penanggung jawab Humas di UPT				
Sumber Data : Penanggung jawab Humas di UPT				
Status : Digunakan				
Periode Pelaporan : Mingguan				
Metode Cascading : Komponen Pembentuk				
Target :				
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
3 Publikasi	0 Publikasi	1 Publikasi	0 Publikasi	2 Publikasi
Perhitungan Data : Akumulasi				
IK.3.9 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				
Validitas : Output Kendali Tinggi				
Polarisasi : Maximize				
Definisi : Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam melakukan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat atas pelayanan perkarantinaan				

Indikator Atasan: Menghitung indeks kepuasan masyarakat berdasarkan pedoman penilaian IKM sebagaimana diamahkan dalam Permenpan RB										
Metode Pengukuran : Hasil pengisian Quisioner IKM Badan Karantina Indonesia oleh pengguna jasa karantina pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia										
Sumber Data : Penanggung jawab IKM di UPT										
Status : Digunakan										
Periode Pelaporan : Tahunan										
Metode Cascading : Komponen Pembentuk										
Target :										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahunan</th> <th>TW I</th> <th>TW II</th> <th>TW III</th> <th>TW IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>81 Nilai</td> </tr> </tbody> </table>	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	81 Nilai
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV						
81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	81 Nilai						
Perhitungan Data : Akumulasi										
SS.4 Terwujudnya layanan Keuangan yang baik										
IK.4.10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta										
Validitas : Output Kendali Tinggi										
Polarisasi : Maximize										
Definisi : Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Badan Karantina Indonesia yang tertuang dalam dokumen anggaran berbagai kalangan Masyarakat.										
Indikator Atasan: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta										
Metode Pengukuran : Penghitungan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga										
Sumber Data : Kementerian Keuangan: Aplikasi SMART/OM SPAN Kementerian Keuangan										
Status : Digunakan										
Periode Pelaporan : Tahunan										
Metode Cascading : Komponen Pembentuk										
Target :										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahunan</th> <th>TW I</th> <th>TW II</th> <th>TW III</th> <th>TW IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>81 Nilai</td> </tr> </tbody> </table>	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	81 Nilai
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV						
81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	81 Nilai						

Perhitungan Data : Akumulasi											
SS.5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik										
IK.5.11	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat										
Validitas : Output Kendali Tinggi											
Polarisasi : Maximize											
Definisi : Indikator ini mencerminkan kinerja Badan Karantina Indonesia dalam upaya menerapkan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Output dapat berupa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hasil penilaian Inspektorat Badan Karantina Indonesia											
Indikator Atasan: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah											
Metode Pengukuran : Penilaian SAKIP dari Inspektorat Badan Karantina Indonesia											
Sumber Data : 81											
Status : Digunakan											
Periode Pelaporan : Tahunan											
Metode Cascading : Komponen Pembentuk											
Target :											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahunan</th> <th>TW I</th> <th>TW II</th> <th>TW III</th> <th>TW IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>0 Nilai</td> <td>81 Nilai</td> </tr> </tbody> </table>	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	81 Nilai
Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV							
81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	81 Nilai							